

ABSTRAK

Responsivitas merupakan daya tanggap atau kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah seperti pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan mendaur ulang. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 48 Tahun 2021 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan sampah kepada camat. Menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengelolaan sampah di kecamatan yang memiliki tujuan untuk dapat mengurangi jumlah volume sampah yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari observasi dan pengamatan. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2012:63) dimana terdapat empat indikator responsivitas yaitu terdapat tidaknya keluhan masyarakat, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan masyarakat, tindakan aparat birokrasi dalam memberikan kepuasan pelayanan, dan penempatan masyarakat oleh aparat birokrasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terdapat berbagai keluhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah, sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan masyarakat yang kurang responsif, tindakan aparat birokrasi yang sudah ada namun belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal, dan penempatan masyarakat dalam sistem pelayanan yang belum berjalan dengan maksimal karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Dari hasil penelitian tersebut bahwa responsivitas pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat program pengelolaan sampah serta dapat meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada guna mengurangi volume sampah yang terjadi di Kecamatan Bilah Hulu.

Kata Kunci : Responsivitas, Pemerintah, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Responsiveness is the government's responsiveness or ability to demonstrate harmony between programs and activities and develop programs in accordance with community needs. Waste management is a systematic, comprehensive, and sustainable activity that includes reducing and handling waste such as collection, transportation, management, and recycling. As stated in the Republic of Indonesia government regulation Number 27 of 2020 concerning specific Waste Management. Regional Regulation of Labuhanbatu Regency Number 8 of 2017 concerning waste management. And Labuhanbatu Regent Regulation Number 48 of 2021 concerning the delegation of part of the waste management authority to the sub-district. Explain that the government has the duty and authority to carry out waste management in sub-districts which aims to reduce the amount of existing waste volume. The approach used in this study is descriptive qualitative and supported by secondary data, the type of data used is primary data obtained from interviews and secondary data obtained from observations and observations. Data analysis techniques start from collecting information through interviews, data reduction, and drawing conclusions. This research uses the theory of Agus Dwiyanto (2012: 63) where there are four indicators of responsiveness, namely the presence or absence of community complaints, the attitude of bureaucratic officials in responding to community complaints, the actions of bureaucratic officials in providing service satisfaction, and the placement of the community by bureaucratic officials. The results of the study show that there are still many public complaints regarding waste management, the attitude of bureaucratic officials in responding to community complaints that are not responsive, the actions of bureaucratic officials that already exist but have not fully run optimally, and the placement of the community in the service system that has not run optimally because of the lack of socialization carried out. From the results of the study, the government's responsiveness is needed to create a waste management program and can increase cooperation with the community in overcoming existing waste problems to reduce the volume of waste that occurs in Bilah Hulu District.

Keywords: Responsiveness, Government, Waste Management